Kemenkes
BBKK Medan

BULETIN

HORAS SEHAT



CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)

Kado Ulang Tahun dari Pemerintah untuk Membantu Masyarakat Hidup Lebih Sehat

TRANSFORMASI INTERNAL BBKK MEDAN

Perubahan Budaya Kerja Untuk Melayani Lebih Baik

SURVEILANS KESEHATAN HAJI EMBARKASI MEDAN

Data Sekunder dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes)

EDISI MARET 2025

SUSUNAN REDAKSI

Pengarah
- dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Penanggung Jawab
- Wulida Gusdani Harahap,SE,MKM

Redaktur
- Zulfan Anshari Nasution,SKM

Redaktur Pelaksana
- Riza Fahlevi Wakidi, S.Farm, Apt, M.Si

Editor
- Ervina Sukariani Ginting, SE
- Ulil Hikmah Hakimi, SKM

Desain Grafis
- Aris Fauzan, S.Kom
- Sigit Prabowo, S.Kom

Sekretariat
- Rina Ardhiana,SKM
- Herlianta, SKM
- Putri Ayu Sari Br Tarigan

Berita/Artikel
- Yunni Sari, SKM
- Rizal Mayridian, SKM
- dr. Hamonangan Parhusip
- dr. Indah Maya Sari
- Kevin Oktra Gilang Prakasa, SKM

MEDIA SOSIAL

BBKKMEDAN

INFORMASI

BBKKMEDAN.ID

ALAMAT REDAKSI

Jl. Veteran No.219, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Kota Medan, Sumatera Utara 20411
(061) 6941343

SEKAPUR SIRIH

Salam sehat untuk kita semua,

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan Buletin Horas Sehat dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan. Dalam edisi kali ini, kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.



Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan kekarantinaan kesehatan, kami berupaya untuk menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan. Kami juga ingin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Kami berharap buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

Kemenkes BBKK Medan

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	02
DAFTAR ISI	03
TRANSFORMASI INTERNAL	04
KOMPETENSI MANSOSKUL SESUAI JOB PERSON MATCH	08
KEBIJAKAN EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA	12
KENALAN DENGAN TIMKER 5	16
BBKK MEDAN SIAGA!	18
SELAYANG PANDANG TIMKER 1	21
RINGKASAN SURVEILANS KESEHATAN HAJI DI EMBARKASI MEDAN TAHUN 2022 S.D. 2024	24
BULETIN MINGGUAN SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON DAN RESPON MINGGU 10 TAHUN 2025	26
BRIEFING TIMKER 2	30
PROFIL LABORATORIUM KESLING BBKK MEDAN "PERKASA"	31
SISTEM KEPATUHAN INTERNAL "PENTINGNYA DAN PENERAPANNYA DALAM ORGANISASI"	41
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA ORGANISASI BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 25 TAHUN 2019	39

BBKK MEDAN



Oleh : Ratna Budi Hapsari

Transformasi Internal Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan, Perubahan Budaya Kerja Untuk Melayani Lebih Baik

Di tengah tantangan besar dalam pencapaian indikator kesehatan nasional yang masih tertinggal dan tantangan desentralisasi, Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah berani dengan melakukan transformasi menyeluruh dalam sistem kesehatan.

Sejak tahun 2021, Enam Pilar Transformasi Kesehatan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan telah membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dari inisiatif ini, diperlukan transformasi internal yang berfokus pada perubahan budaya kerja.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tidak hanya berkomitmen untuk membangun organisasi Kementerian Kesehatan yang lebih efisien, inovatif, dan responsif, tetapi juga mengajak semua jajaran untuk bersama-sama menjalani perjalanan transformasi ini.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan, sebagai bagian dari upaya tersebut, tidak mau ketinggalan segera bergerak untuk mengadopsi dan menerapkan perubahan budaya kerja yang relevan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Perubahan budaya kerja di BBKK Medan dibangun berdasarkan nilai inti "BerAKHLAK," yang mencakup: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ada tiga tema utama yang menjadi fokus dalam perubahan budaya ini, yaitu: eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul.

EKSEKUSI EFEKTIF:
LANGKAH UNTUK SUKSESNYA STRATEGI

Eksekusi efektif dalam transformasi internal sangat krusial. Ini adalah kemampuan untuk melaksanakan perubahan yang dibutuhkan secara efisien dan terencana.

BBKK Medan menerapkan enam langkah eksekusi efektif, mulai dari menentukan *outcome*, menentukan *output*, mengidentifikasi kegiatan/intervensi untuk mencapai *output*, menetapkan indikator terlaksananya kegiatan/intervensi, melaksanakan kegiatan/intervensi disertai monitoring indikator, hingga mengapresiasi kemajuan.

Ketika menghadapi masalah dalam penyelenggaraan karantina kesehatan, Tim Kerja terkait akan langsung mencari solusi dan mengeksekusinya menggunakan enam langkah tersebut. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan tim, tetapi juga mendorong pembiasaan dalam melaksanakan eksekusi efektif sehari-hari, sehingga tanpa disadari akan terjadi internalisasi kemampuan eksekusi efektif.



Cara Kerja Baru: Inovasi dan Kolaborasi dalam Setiap Langkah

Inti dari cara kerja baru adalah dorongan untuk berpikir dan bekerja secara inovatif serta kolaboratif. Setiap individu di BBKK Medan diperbolehkan untuk menjadi pembelajar, menerapkan pengetahuan baru dalam tugas sehari-hari. Kemajuan teknologi, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), menjadi bagian penting dari strategi ini, memungkinkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.



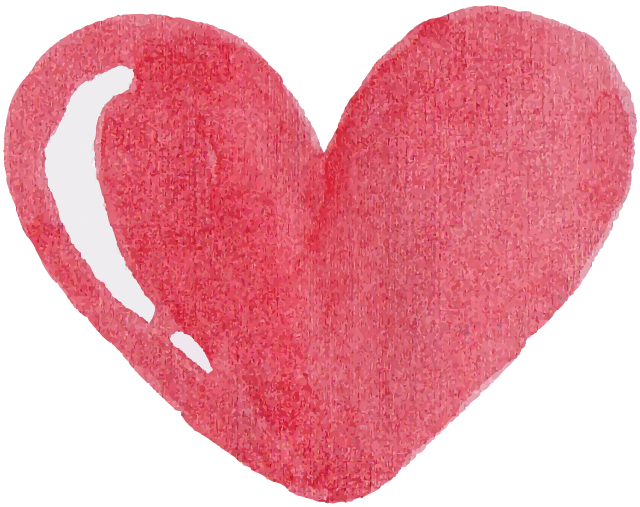
Pelayanan Unggul: Menyentuh Hati, Mengutamakan Masyarakat

Pelayanan unggul bukan sekadar frasa, tetapi menjadi semangat menyala di BBKK Medan. Kami percaya bahwa setiap interaksi dengan masyarakat harus dibangun atas dasar empati dan pengertian, menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Insan BBKK Medan membiasakan diri untuk tidak hanya melayani, tetapi juga memahami dan merasakan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, juga membiasakan diri bersikap proaktif dan responsif, berupaya memberikan solusi dan layanan terbaik kepada setiap pelanggan kami.

Dengan perubahan budaya kerja, BBKK Medan tidak hanya beradaptasi dengan tuntutan zaman, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Transformasi kesehatan yang dijalankan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang tidak hanya terasa oleh masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi buat kita semua.

Melayani dengan hati, untukmu Negeri! (RBH)





Oleh : Wulida Gusdani Harahap

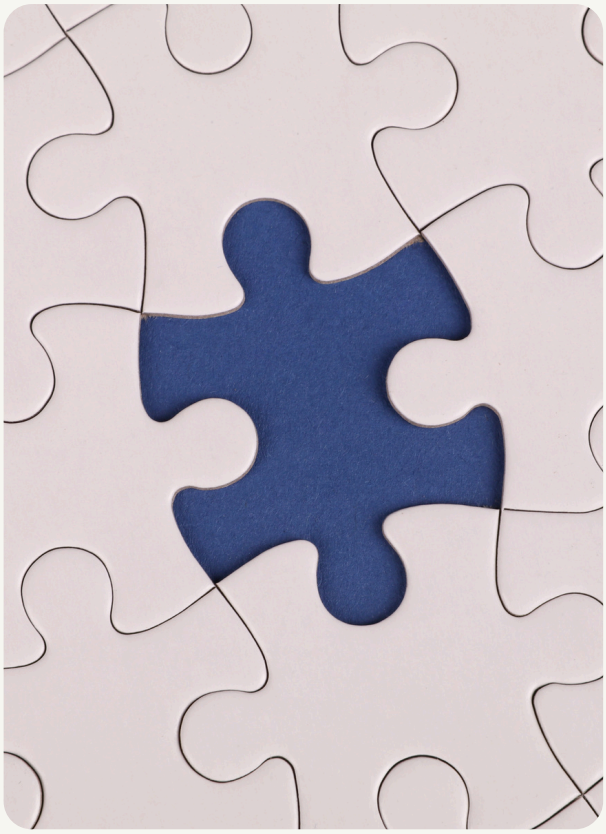
KOMPETENSI MANSOSKUL SESUAI *JOB PERSON MATCH*

Para pemangku jabatan fungsional semakin tertantang dengan adanya Surat Edaran Sekjen Kemenkes No. HK.02.02/A/5049/2024 Tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama Dan Ahli Madya Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana isi SE tersebut, dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung Transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya yang memiliki peran sangat penting dalam pencapaian target organisasi

Pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dilakukan melalui proses seleksi dengan kualifikasi-kualifikasi yang tertera sebagaimana dalam surat. Salah satu persyaratannya adalah, memenuhi nilai ambang batas hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai *Job Person Match* (JPM) dari standar kompetensi jabatan fungsional yang akan diduduki.

Apa itu *Job Person Match (JPM)*?

Job Person Match menurut Perka BKN No. 26 Tahun 2019 yaitu perbandingan antara nilai capaian kompetensi *Assessee* (pegawai yang akan dinilai kompetensinya) dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase. Dengan bahasa lain, JPM merupakan alat analisis yang dirancang untuk mengukur kesesuaian kompetensi seseorang dengan jabatan atau peran yang akan diembannya.



Sesuai SE di atas, pemenuhan nilai ambang batas hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai *Job Person Match* (JPM) dari standar kompetensi jabatan fungsional yang akan diduduki untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama, minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan Jabatan Fungsional Ahli Madya, minimal 72% (tujuh puluh dua persen).

Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural



(Permen PANRB 38/2017)

Kompetensi Manajerial
Integritas
Kerjasama
Komunikasi
Orientasi Pada Hasil
Pelayanan Publik
Pengembangan diri & orang lain
Mengelola Perubahan
Pengambilan Keputusan
Sosio Kultural
Sosio Kultural

Standar kompetensi jabatan ASN di dalam Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang aspek kompetensi manajerial memuat sebanyak 8 kompetensi yaitu: Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi Pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan. Aspek kompetensi sosial kultural terdiri atas Perekat Bangsa. Definisi dan indikator perilaku pada masing-masing kompetensi tertuang dalam Kamus Kompetensi Sosial Kultural dan dapat dikulik lebih rinci pada lampiran Permenpan tersebut.

Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai *Job Person Match (JPM)* di BBKK Medan

Di BBKK Medan, berdasarkan rekapitulasi hasil asesmen sebanyak 111 pegawai telah mengikuti Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dalam kurun waktu 2021 – 2024, baik dengan metode *assessment center* (6 orang) maupun metode *rapid assessment* (105 orang) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) .

Hasil assessment JPM (%) Mansoskul Sesuai Jabatan Saat Ini di BBKK Medan menunjukkan sebanyak 79 orang mempunyai hasil penilaian JPM lebih besar dari 72%.

Hasil ini menunjukkan bahwa 71% pegawai BBKK Medan sudah sesuai kompetensi manajerial dan sosial kultural pada jabatan yang sedang didudukinya saat ini, bila kita merujuk pada SE di atas.

Tabel Job Person Match (%) Mansoskul Sesuai Jabatan Saat Ini Di BBKK Medan

Kategori JFT	Lebih Kecil dari Atau Sama Dengan 72%	Lebih besar dari 72%	Total
Ahli Pertama	4	22	26
Ahli Muda	20	19	39
Ahli Madya	7	6	13
Selain Ahli Pertama, Muda dan Madya	1	32	33
	32	**79**	**111**

Sumber: Data Diolah dari Rekapitulasi Hasil Asesmen BBKK Medan s.d Tahun 2024

Yang Lebih Kecil dari Atau Sama Dengan 72% lagi bagaimana?

Berdasarkan data di atas, terdapat 32 orang dengan hasil penilaian kompetensi mansoskul sesuai JPM dengan nilai lebih kecil dari atau sama dengan 72%. Artinya, bila dianalogikan dengan SE di atas, sebanyak 32 orang yang belum terpenuhi syarat kesesuaian kompetensinya dengan jabatan atau peran yang sedang diembannya.

Berdasarkan dari pengalaman penulis mengerjakan soal, ada faktor internal maupun eskternal yang mempengaruhi. Faktor internal mencakup kemampuan diri dalam mengerjakan soal, misalnya tidak cakap atau sedang sakit. Faktor eskternal bisa dipengaruhi oleh lingkungan pegawai yang sedang dinilai kompetensinya, yang mungkin menyebabkan pegawai tersebut tidak fokus mengerjakan soal. Contohnya, tumpukan pekerjaan yang mendekati batas akhir waktu saat pegawai sedang dinilai.



Calon Madya?

Bagi ASN yang berminat untuk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya dihimbau untuk mengikuti setiap perkembangan informasi terkini terkait tata Kelola JF Jenjang Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sekarang ini, informasi bisa didapat darimana saja baik melalui kanal informasi resmi seperti *WA Blast*, *Zoom*, akun *Youtube Official* maupun WA *Group* kantor. Dengan demikian, semoga yang sedang berproses Madya, lulus semuanya!

Amin.

Semangat dan terus berusaha!





Oleh: Kevin Oktra Gilang Prakasa

"KEBIJAKAN EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA"



Dalam era efisiensi anggaran, BBKK Medan menghadapi tantangan besar dalam menjaga produktivitas tanpa mengorbankan realisasi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemotongan anggaran sering kali berpengaruh pada operasional kantor serta program-program yang berjalan. Namun, dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran dapat diimplementasikan tanpa mengurangi efektivitas serta kinerja BBKK Medan.

"KEBIJAKAN EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA"

PENDAHULUAN

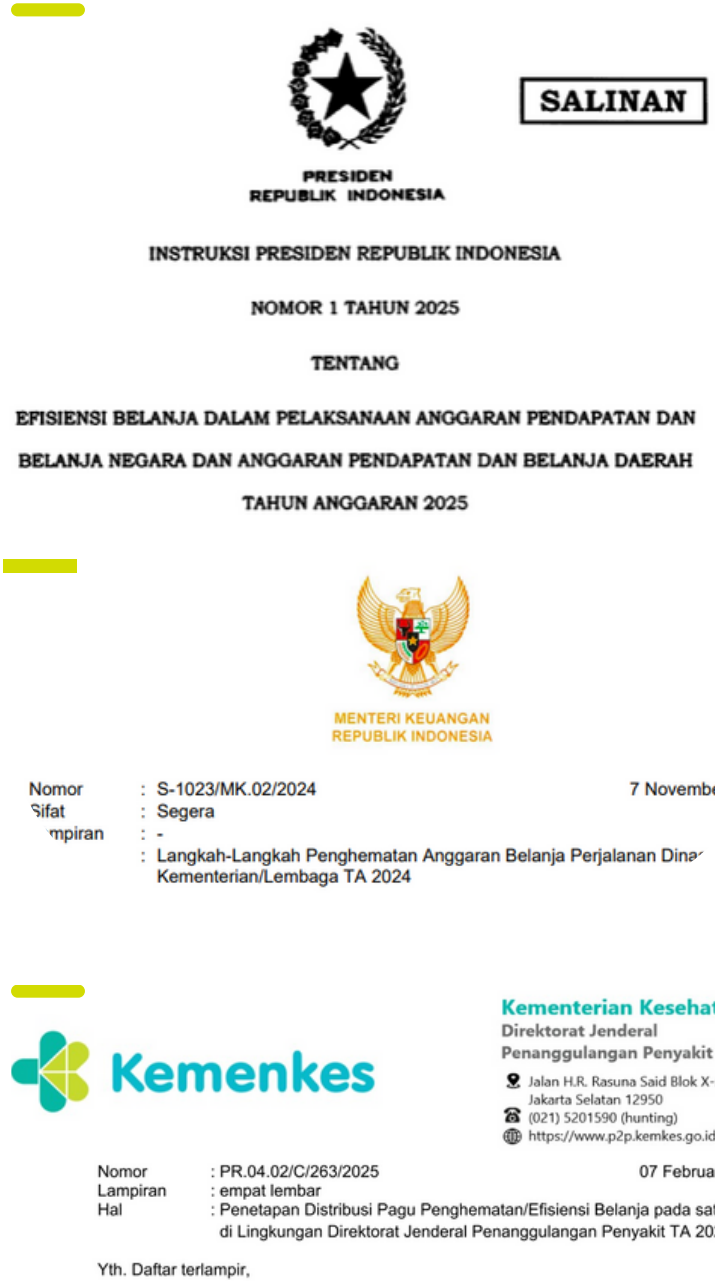
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Inpres ini menginstruksikan langkah-langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sebelum penerbitan Inpres tersebut, upaya efisiensi sudah mulai terlihat sejak akhir 2024 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 yang memangkas 50% anggaran perjalanan dinas.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti surat dari Plt Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit PR.04.02/C/263/2025 tertanggal 07 Februari 2025 maka BBKK Medan mengajukan efisiensi belanja satker sebesar Rp 5.341.357.000.

DASAR HUKUM



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-1023/MK.02/2024 7 November 2
Sifat : Segera
mpiran : -
: Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dina
Kementerian/Lembaga TA 2024

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.p2p.kemkes.go.id

Nomor : PR.04.02/C/263/2025 07 Februari 2025
Lampiran : empat lembar
Hal : Penetapan Distribusi Pagu Penghematan/Efisiensi Belanja pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit TA 2025

Yth. Daftar terlampir,

"KEBIJAKAN EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA"

EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA

Efisiensi anggaran memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, karena kebijakan penghematan keuangan dapat mempengaruhi berbagai aspek kerja termasuk kesejahteraan pegawai-sarana kerja serta beban tugas yang mereka emban.

Ketersediaan Sumber Daya dan Fasilitas Kerja
Efisiensi anggaran sering kali berdampak pada pengurangan fasilitas dan sumber daya yang tersedia bagi pegawai BBKK Medan.

Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai
Pemangkasan anggaran sering kali berimbas pada fasilitas atau kesempatan pengembangan pegawai BBKK Medan.

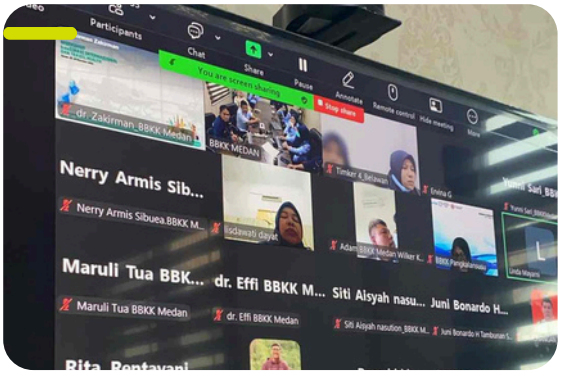
Beban Kerja dan Efisiensi Operasional
Jika tidak diimbangi dengan peningkatan teknologi atau sistem kerja yang lebih efisien, pegawai dapat mengalami kelelahan atau burnout yang akhirnya menurunkan kualitas kinerja.

Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi
Efisiensi anggaran dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui digitalisasi dan otomatisasi.

Evaluasi dan Pengukuran Kinerja
Efisiensi anggaran menuntut BBKK Medan untuk lebih ketat dalam mengukur hasil kerja pegawai. Dengan adanya monitoring PK dan RO melalui *E-Sheet Workflow*, BBKK Medan dapat memastikan bahwa setiap pegawai tetap produktif meskipun terjadi keterbatasan anggaran.

KOORDINASI RENCANA EFISIENSI





BBKK Medan selalu melibatkan seluruh tim kerja dan rekan-rekan di wilayah kerja BBKK Medan dalam setiap perumusan keputusan. Koordinasi yang baik dalam penyusunan rencana efisiensi menjadi fondasi utama bagi tercapainya tujuan efisiensi yang diharapkan. Dengan koordinasi yang terintegrasi, setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance.*

"KEBIJAKAN EFISIENSI DAN TANTANGAN KINERJA"

Penghematan Energi

Nota dinas Kepala BBKK Medan Nomor:HK.02.03/C.IX.4/413/2025 tentang penghematan/efisiensi energi dan air di lingkungan BBKK Medan merupakan respon positif BBKK Medan dalam menanggapi kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan. Arahan yang diberikan merupakan wujud nyata dalam pengendalian ketat terhadap pengeluaran non-prioritas serta pengurangan biaya operasional yang tidak mendesak.

Work From Anywhere (WFA)

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, selain mengurangi penggunaan energi di kantor Induk BBKK Medan sistem *WFA* juga mendorong kebebasan kepada pegawai BBKK Medan untuk terus berinovasi dalam melaksanakan tugas.

Optimalisasi Pelatihan Daring

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya akses internet, BBKK Medan mendorong seluruh pegawainya untuk aktif meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran mandiri secara daring.

Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan
Dengan akses pengetahuan yang lebih baik, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Fleksibilitas Akses
Pelatihan daring memungkinkan Pegawai BBKK Medan untuk melakukan peningkatan kompetensi tanpa mengorbankan produktivitas kerja.

Penguatan Keterampilan Digital
pelatihan daring membantu Pegawai BBKK Medan menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi.

Penghematan Anggaran dan Waktu
Dengan mengadopsi pelatihan daring, BBKK Medan dapat menghemat biaya pelatihan serta mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pelatihan konvensional.

Kesimpulan

Menanggapi kebijakan efisiensi sebagai sebuah peluang memungkinkan BBKK Medan untuk tidak hanya menghemat anggaran dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja. Dengan mengadopsi teknologi, memperbaiki budaya kerja, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, BBKK Medan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



oleh : Riza Fahlevi Wakidi

Kenalan dengan Timker 5 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan: Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

Halo! Senang sekali bisa berbagi informasi tentang Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas, atau yang kita kenal sebagai Timker 5, di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan.

Timker 5 memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik dan integritas tetap terjaga. Mereka bertugas memastikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terlaksana sesuai Permen PAN-RB No 90/2021.

Selain itu, tim ini melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak kalah pentingnya, mereka juga mengawasi pengendalian gratifikasi, menangani *Whistleblowing System* (WBS), serta pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.

Untuk memastikan semua berjalan optimal, mereka juga fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan pelaksanaan direktif pimpinan sesuai target. Dengan segala upaya ini, Timker 5 berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan BBKK Medan.

Salah satu fokus utama Timker 5 adalah membangun Zona Integritas yang bebas dari korupsi. Mereka berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Timker 5 di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan berperan aktif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui berbagai inisiatif dan langkah strategis. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan oleh Timker 5 dalam mendukung tujuan tersebut:

1. Pencanangan dan Komitmen

Timker 5 telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas dengan deklarasi dari pimpinan dan seluruh pegawai. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Penyusunan Pakta Integritas

Sebagai langkah awal, Timker 5 menyusun dan menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan ini dilakukan di hadapan pemangku kepentingan, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pembangunan Zona Integritas.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Tim ini menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu fokus utama Timker 5 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong pegawai untuk melayani dengan semangat.

5. Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Tim ini juga aktif dalam mengendalikan gratifikasi serta menghindari benturan kepentingan di lingkungan kerja. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah13.

6. Pelaksanaan Program Inovatif

Timker 5 merancang program-program inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan umum. Program ini dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang bersih dari korupsi.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait pembangunan Zona Integritas dapat dipantau oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses.

Dengan langkah-langkah tersebut, Timker 5 di BBKK Medan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan kepada masyarakat.

TIMKER 5 di BBKK Medan berusaha keras untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Tidak hanya fokus pada pelayanan informasi, tetapi juga berkomitmen untuk membangun integritas dalam setiap aspek kerja mereka. Semoga dengan adanya tim ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik dan transparan.







Oleh : Indah Suri Zaluchu

BBKK MEDAN SIAGA!

PENGAWASAN UNTUK PEMULANGAN PMI DI BELAWAN

BBKK Medan kembali beraksi! Kali ini, tim karantina kesehatan turun langsung ke Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, buat memastikan pemulangan 22 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah berjalan lancar dan aman. Gak main-main, pengawasan ini jadi langkah penting buat menjaga kesehatan publik dan mencegah penyebaran penyakit menular dari luar negeri.

PMI yang dipulangkan ini sebelumnya dideportasi dari Malaysia dan sudah melewati proses pendataan di BP3MI Kepulauan Riau.



Mereka berlayar dari Pelabuhan Batam dengan KM Kelud dan tiba di Belawan pada 2 Maret 2025. Begitu menginjak tanah air, BBKK Medan bareng tim medis langsung gercep (gerak cepat) buat memeriksa kondisi kesehatan mereka.



Cek Kesehatan, Biar Aman dan Nyaman

Begitu sampe, tim BBKK Medan langsung bersiap buat skrining kesehatan. Dari cek suhu tubuh, deteksi penyakit menular, sampai edukasi kesehatan, semua dilakukan dengan teliti. Gak cuma itu, para PMI juga dikasih wawasan penting soal bahaya kerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas.

“Kami pastikan setiap PMI yang tiba di Belawan sehat dan gak membawa penyakit menular. Ini bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat,” kata salah satu petugas BBKK Medan. BBKK Medan gak kerja sendiri. Mereka juga kerja sama bareng BP3MI Sumatera Utara, Dinas Kesehatan, dan aparat keamanan. Setelah dinyatakan sehat, para PMI langsung diserahkan ke BP3MI Sumut buat dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Bukan Cuma Pengawasan, Tapi Juga Edukasi! Selain ngejaga kesehatan, BBKK Medan juga ngasih edukasi soal pentingnya vaksinasi dan pencegahan penyakit menular. Harapannya, para PMI makin sadar pentingnya menjaga kesehatan sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri.

Kemenkes BBKK Medan

SATUSEHAT

Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Jenis pemeriksaan yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia.



Apa aja sih manfaatnya??

- Jadi tahu kondisi badan
- Lebih cepat tahu, lebih mudah ditangani dan cepat sembuh
- Jadi tau apa yang harus dilakukan agar tetap sehat

Untuk siapa aja??

- Bayi Baru Lahir
- Balita dan Anak Prasekolah
- Remaja dan Dewasa
- Lansia

Masih penasaran?
Scan barcode ini ya

bitly

Kemenkes BBKK Medan

SATUSEHAT

SKRINING MANDIRI WAJIB

UNTUK SEMUA PESERTA
CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)

Skrinning Mandiri diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui faktor risiko kesehatan sebelum datang ke lokasi pemeriksaan CKG

https://form.kemkes.go.id/ckg



Ikuti Langkah Langkah Berikut

1. Setelah pindai, masukkan **NOMOR TIKET** dan **TANGGAL LAHIR**
2. Periksa dan pastikan data diri sudah sesuai
3. Klik formulir kesehatan yang akan diisi
4. Jawab setiap pertanyaan sesuai kondisi kesehatan diri sendiri
5. Setelah selesai, klik **KIRIM**

Pastikan sudah isi ya agar cek kesehatan lebih cepat dan optimal!

Cara Scan **QR Code**

Aktifkan koneksi internet melalui wifi atau paket data

Pindai atau scan QR Code menggunakan kamera HP



Oleh : Yunni Sari

SELAYANG PANDANG TIM KERJA 1

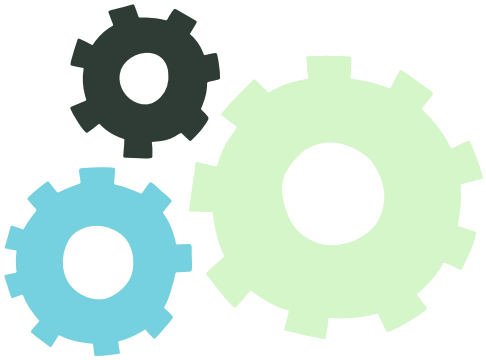
TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Nomor : HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Tugas Timker Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan, meliputi:

- Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB danwabah;
- Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
- Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
- Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan; Penanggulangan KLB danwabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
- Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- Penyiapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

Selain tugas sesuai substansi di atas, setiap ti tim kerja juga memiliki tugas:

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk mencapai target tim kerja;
- melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
- melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
- melakukan koordinasi antar tim kerja;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
- menyusun laporan kegiatan; dan
- menyampaikan laporan kepada pimpinan.



Personil Tim Kerja 1

KETUA TIM KERJA I

Seorang dokter dengan jabatan Epidemiolog Kesehatan Madya yang saat ini sedang mengikuti Pelatihan Epidemiologi Lapangan (*Field Epidemiology Training Program* - FETP) Level *Intermediate*



dr. Zakirman

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA



Friska Erlina Simamora, SKM, M.Kes



dr. Dwi Mayaheti Nasution, M.Kes



Lisdawati, ST, M.Kes



Sri Widayanti, SKM, MKM

DOKTER AHLI MUDA



dr. Yane Frisda Marpaung



dr. Doddy Faisal Mahdi Pane

Personil Tim Kerja 1

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA



Yunni Sari, SKM



Lamria Marintan Panjaitan, SKM, M.Kes



Syaifuddin, SKM



Basa Marina, SKM

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA



Rosiah Hasibuan, SKM

EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI



Muhammad Adam Malik Siregar, SKM

EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA



Elvi Dameria Ketaren, SKM

EPIDEMIOLOG KESEHATAN MAHIR



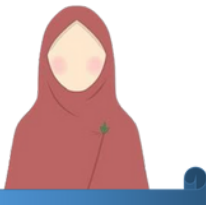
Hobbes Apeldorn

EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL



Mhd. Thoha Gumanti Nasution

SANITARIAN TERAMPIL



Ainissyifa Pane



Oleh : Yunni Sari

RINGKASAN SURVEILANS KESEHATAN HAJI DI EMBARKASI MEDAN TAHUN 2022 S.D. 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji, Bandara Internasional Kualanamu Medan (KNO) ditetapkan sebagai Embarkasi Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

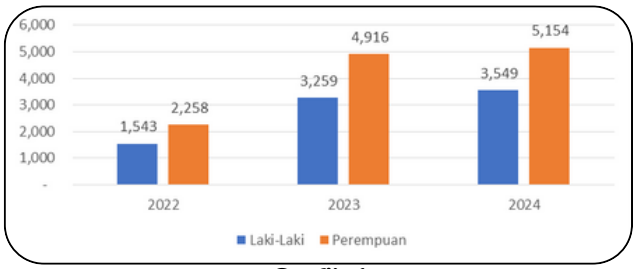
Surveilans kesehatan haji di Embarkasi Medan merupakan bagian penting dalam memastikan kesehatan jamaah haji Provinsi Sumatera Utara. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan memiliki peran utama dalam pelaksanaan surveilans ini, dengan tugas mencegah dan mengendalikan masuk atau keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan di pintu masuk negara.

Ringkasan surveilans kesehatan haji Embarkasi Medan dengan menggunakan data sekunder berupa data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024. Siskohatkes adalah sistem yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk mengelola data kesehatan jemaah haji.

Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon jemaah haji memenuhi persyaratan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal selama perjalanan haji.

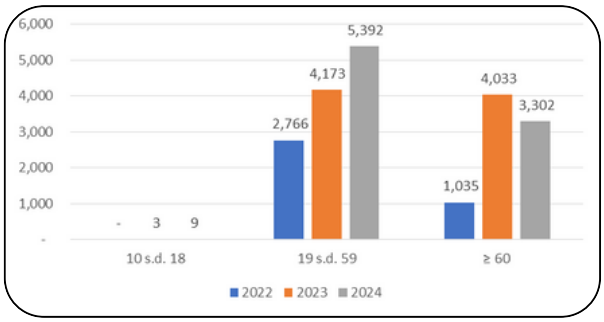
Metode yang digunakan adalah mendeskripsikan surveilans kesehatan haji di Embarkasi Medan tahun 2022 s.d. 2024 dengan melakukan analisis berdasarkan orang, tempat, dan waktu dengan tujuan agar dapat menginterpretasikan pelaksanaan surveilans kesehatan haji di Embarkasi Medan dan merekomendasikan berdasarkan hasil dari ringkasan surveilans kesehatan haji di Embarkasi Medan.

Ringkasan surveilans kesehatan haji Embarkasi Medan berdasarkan orang meliputi jenis kelamin, kelompok usia, kelompok risiko tinggi, dan jamaah haji wafat.



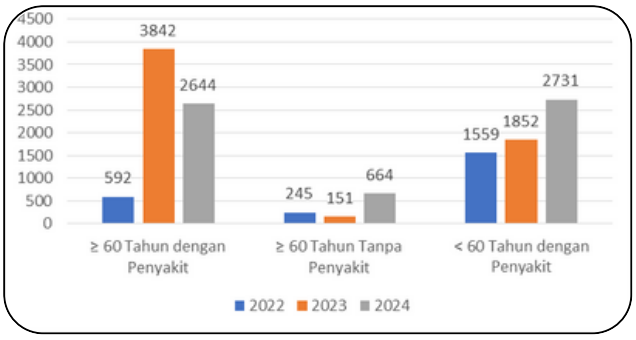
Grafik 1
Distribusi Jamaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin di Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

Distribusi jamaah haji pada tahun 2022 s.d. 2023 didominasi oleh jamaah haji perempuan dengan persentase sebanyak 59,62%.



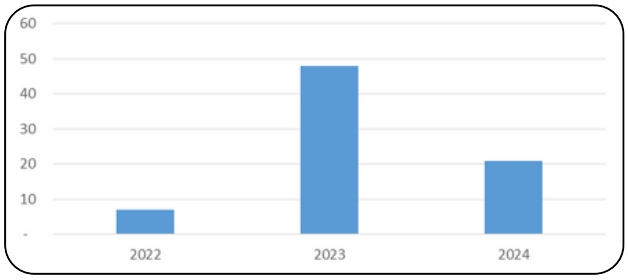
Grafik 2
Distribusi Jamaah Haji Berdasarkan Kelompok Usia di Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

Pada tahun 2022 terlihat hanya sedikit kelompok usia lansia yang berangkat haji karena kebijakan pemberangkatan jamaah haji terkait pandemi COVID-19 pada tahun 2022 batas usia maksimal adalah 65 tahun, sehingga jamaah haji di atas usia 65 tahun harus ditunda untuk diberangkatan di tahun 2023. Dan terlihat di tahun 2023 jamaah haji lansia meningkat, sehingga slogan ”Haji Ramah Lansia” digalakkan oleh Kementerian Agama. Sedangkan untuk tahun 2024 sudah kembali normal.



Grafik 3
Distribusi Jamaah Haji Berdasarkan Kelompok Risiko Tinggi di Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

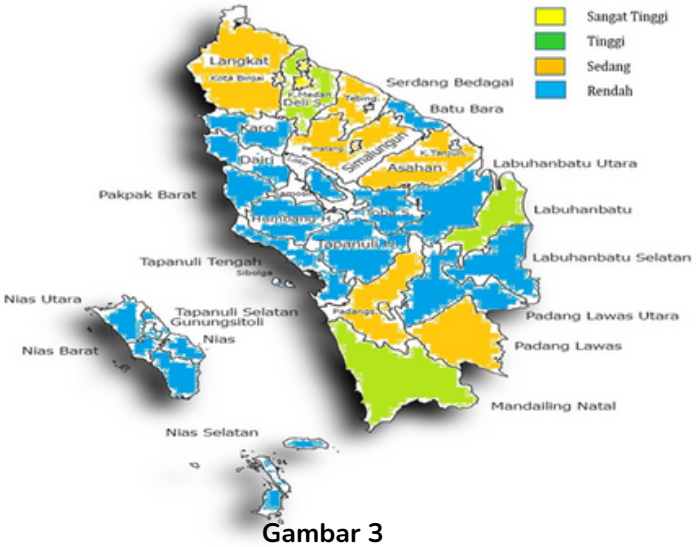
pada tahun 2022 s.d. 2024 terbanyak pada kelompok risiko tinggi ≥ 60 tahun dengan penyakit yaitu sebanyak 49,56%.



Grafik 7
Distribusi Jamaah Haji Wafat Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

Distribusi jamaah haji wafat Embarkasi Medan pada Tahun 2022 s.d. 2024 tertinggi di tahun 2023 sebesar 63,16% dengan diagnosa terbesar ada penyakit cardiovaskular.

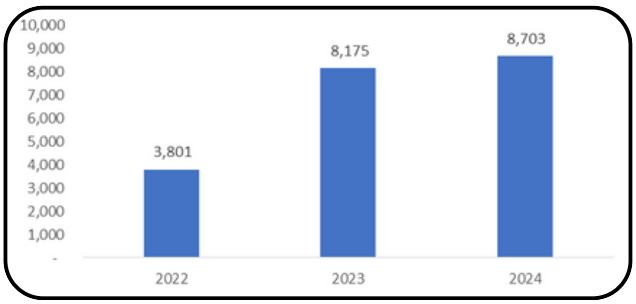
Ringkasan surveilans kesehatan haji Embarkasi Medan berdasarkan tempat. Berikut peta sebaran rata-rata jamaah haji di Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024.



Gambar 3
Peta Sebaran Rata-Rata Jamaah Haji di Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

Jamaah haji dengan kategori sangat tinggi di embarkasi Medan berasal dari Medan, kategori tinggi berasal dari Deli Serdang, Mandailing Natal dan Labuhan Batu.

Ringkasan surveilans kesehatan haji Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2-2024 berdasarkan waktu sebagai berikut:



Grafik 4
Distribusi Jamaah Haji Berdasarkan Waktu Embarkasi Medan Tahun 2022 s.d. 2024

Distribusi jamaah haji Embarkasi Medan berdasarkan waktu pada Tahun 2022 s.d. 2024 terus bertambah berdasarkan kebijakan pemerintah dilihat dari musim haji setiap tahunnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan haji yaitu pada tanggal 10-20 Juni 2022, 23 Mei s.d 16 Juni 2023, dan 12 Mei s.d. 9 Juni 2024.

Rekomendasi: memperketat protokol kesehatan terutama bagi jemaah risti, meningkatkan edukasi kesehatan terkait penyakit tidak menular pada jamaah haji, memastikan ketersediaan obat-obatan untuk penyakit kronis selama keberangkatan, dan optimalisasi pencatatan dan pelaporan kasus secara digital agar mudah dipantau pusat.





Oleh : Lamria Marintan Panjaitan

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

BULETIN MINGGUAN
SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON DAN RESPON
MINGGU 10 TAHUN 2025 (02 - 08 Maret 2025)

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut dengan Early Warning Alert Response and System (EWARS) adalah sebuah sistem yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah, dan Alert atau sinyal peringatan dini yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskan petugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB. (TIM Kerja Surveilans Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan kesehatan, Tahun 2023).

Tujuan Penyelenggaraan SKDR di Pintu Masuk Negara adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan deteksi dini KLB penyakit menular berpotensi KLB
2. Memberikan input kepada program dan sektor terkait untuk melakukan respon pengendalian penyakit menular berpotensi KLB
3. Meminimalkan kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular berpotensi KLB.
4. Memonitor kecenderungan atau tren penyakit menular berpotensi KLB.
5. Menilai dampak program pencegahan dan pengendalian penyakit menular berpotensi KLB.

Sasaran penyelenggaraan SKDR di pintu masuk adalah terselenggaranya upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko di pintu masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik dalam rangka deteksi, pencegahan dan respon, terhadap faktor risiko penyakit. Penyelenggaraan Surveilans berbasis indikator dan berbasis kejadian diaplikasikan antara lain dalam bentuk PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) yang didukung dengan pencarian rumor masalah kesehatan. Setiap unit penyelenggaraan Surveilans Kesehatan melakukan Pemantauan Wilayah Setempat dengan merekam data, menganalisa perubahan kejadian penyakit dan atau masalah kesehatan menurut variabel waktu, tempat dan orang (surveilans berbasis indikator).

Sumber data dari aplikasi terdiri dari IBS (Indicator-Based Surveillance) yang merupakan laporan mingguan dari Faskes yang ada di Lingkungan Kerja BBKK Medan dan EBS (Event-Based Surveillance) merupakan Laporan Kejadian Penyakit berpotensi KLB yang bersumber di Lingkungan Kerja BBKK Medan.

A. IBS (Indicator-Based Surveillance)

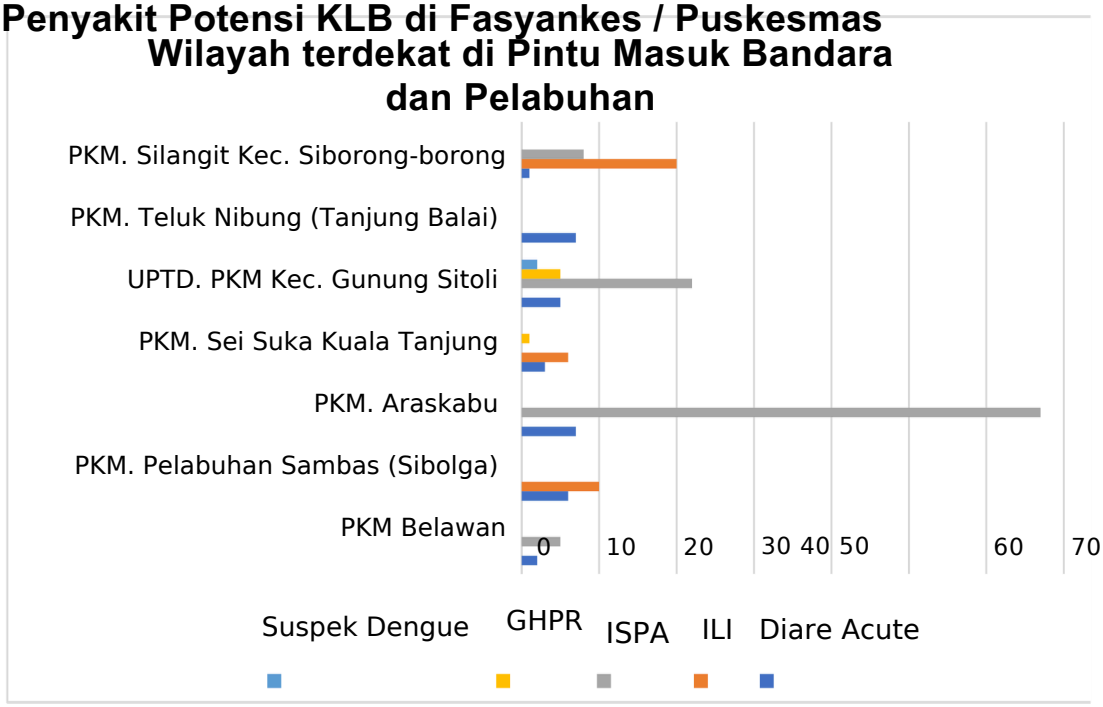
Merupakan Laporan minggu ke -10 Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Puskesmas terdekat Pintu Masuk Pelabuhan / Bandara Lingkungan Pelabuhan BBKK Medan.

DISTRIBUSI PENYAKIT POTENSI KLB DI FASYANKES / PUSKESMAS WILAYAH TERDEKAT DI PINTU MASUK BANDARA DAN PELABUHAN

Penyakit	PKM Belawan	PKM. Pelabuhan Sambas (Sibolga)	PKM. Araskabu	PKM. Sei Suka Kuala Tanjung	UPTD. PKM Kec. Gunung Sitoli
Diare Acute	2	6	7	3	5
ILI	0	10	0	6	0
ISPA	5	0	67	0	22
GHPR	0	0	0	1	5
Suspek Dengue	0	0	0	0	2
Total	7	16	74	10	34
Sumber : SKDR Minggu ke 10 Tahun 2025					

Pada Minggu ke 10 Penyakit Potensial KLB di Puskesmas terdekat Pintu Masuk Pelabuhan dan di Bandara adalah Puskesmas Araskabu dengan total kasus yang Tertinggi adalah 74 Kasus. sedangkan pada Penyakit KLB yang tertingi adalah Penyakit ISPA sebanyak 67 Kasus di Puskesmas Araskabu. Seluruh Puskesmas yang menemukan kasus Potensial KLB sudah di Notifikasi sebagai respon Sistim Kewaspadaan Dini (SKD).

Grafik Penyakit Potensi KLB di Fasyankes / Puskesmas Wilayah terdekat di Pintu Masuk Bandara dan Pelabuhan



B. EBS (Event-Based Surveillance)

(EBS (Event-Based Surveillance) merupakan Laporan Kejadian Penyakit berpotensi KLB pada Minggu ke 10 yang bersumber di Pintu Masuk Pelabuhan dan Bandara seluruh Lingkungan Pelabuhan BBKK Medan

Wilayah kerja / Pos	Kasus ditemukan	Jumlah
Wilker Bandara Kualanamu	0	0
Wilker Tanjung Balai	0	0
Wilker Sibolga	0	0
Wilker Pangkalansusu	0	0
Wilker Kuala Tanjung	0	0
Wilker Silangit	0	0
Total	0	0

Pada minggu ke 10 di pintu Masuk Pelabuhan dan Bandara seluruh Lingkungan Kerja BBKK Medan tidak ada ditemukannya kasus penyakit potensial wabah bagi Pelaku Perjalanan Penumpang maupun Crew Kapal.

RESPON YANG TELAH DITEMUKAN

1. Melakukan Verifikasi terhadap Peringatan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) yang muncul pada setiap Puskesmas.
2. Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk mencari kasus tambahan.
3. Menjaga kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan Non BBKK dalam rangka pengamatan Penyakit Potensial Wabah di Wilayah Buffer dengan.
4. Pengiriman Umpan balik secara rutin dan berkesinambungan.
5. Rekomendasi tata laksana kasus yang ada didaerah Buffer.

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Menyarankan kepada Petugas Surveilans Puskesmas untuk meningkatkan Upaya SKD terhadap Perkembangan Kasus Penyakit yang menjadi peringatan di Lingkungan Kerja BBKK Medan di Wilker masing-masing.



Oleh : Asmira Br Sembiring

BRIEFING TIMKER 2

Pagi yang cerah, Senin, 03 Maret 2025 pukul 08.00 WIB, seperti biasa setiap hari Senin Timker 2 melakukan briefing di salah satu taman di Kantor Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan.
Briefing di pimpin oleh Plh. Katimker 2 yaitu Bapak Rizal Mayridian, SKM berhubung Bapak Katimker 2 yaitu Bapak dr. R.H. Maruli Tua Siahaan, MKM sedang dirawat di rumah sakit, semoga Bapak Katimker 2 lekas sembuh.



Adapun agenda rapat pagi ini tentang kegiatan petugas piket (pengawasan alat angkut di Pelabuhan Laut Belawan), dimana hasil briefing adalah sebagai berikut :

1. Selama masa puasa petugas diharapkan tetap menjaga stamina dan selalu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa
2. Untuk selalu mengisi kegiatan pada Log Book Harian
3. APD untuk kegiatan boarding agar di data dan di kumpulkan, dan akan disimpan pada ruangan khusus (Plh akan berkoordinasi dengan Adum)
4. Seluruh petugas agar tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas

Semoga Tim Piket bisa menjalan tugas sesuai dengan tupoksi dan sehat selalu...Amin



Oleh : Masdiana Sembiring

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PROFIL LABORATORIUM KESLING BBKK MEDAN *"PERKASA"*

PEMERIKSAAN RAPID KESLING AKURAT & SINERGITAS









TIM KERJA 3
PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESLING

Kirim Email Di Sini
bbkkmedan@gmail.com

Kunjungi Laman Kami
https://bbkkmedan.id

LATAR BELAKANG

- Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan merupakan UPT Kemenkes yang bertugas melakukan kegiatan karantina kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan mengawasi kualitas kesehatan masyarakat.

- Tugas dan fungsi BKK salah satunya adalah mengawasi kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- Dalam melaksanakan tugas pengawasan faKtor risiko kesehatan lingkungan , BBKK Medan melakukan pengawasan kesehatan lingkungan melalui inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel lingkungan dan pemeriksaan sampel lingkungan di pelabuhan dan bandara secara laboratorium.



LABORATORIUM KESLING PERKASA

Laboratorium Kesehatan Lingkungan BBKK Medan memiliki konsep PERKASA yaitu:

- Pe : Pemeriksaan pada sampel lingkungan
- R : Rapid (Pemeriksaan sampel yang dilakukan secara rapid/cepat dengan alat digital)
- K : Kesling (dimana hasil pemeriksaan sampel tersebut diperuntukan untuk pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan)
- A : Akurat (hasil pemeriksaan yang akurat)
- Sa: Sinergitas (Bersinergi dengan institusi ataupun lintas sektor terkait dalam melakukan pemeriksaan sampel lingkungan dan apabila ada hasil yang tidak memenuhi syarat maka akan dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratoium yang terakreditasi.



VISI & MISI

Visi :

Menjadi laboratorium kesehatan lingkungan di pelabuhan dan bandara dalam mendukung pelaksanaan kekarantinaan kesehatan dan pelestarian lingkungan.

Misi :

- **Menyediakan layanan laboratorium secara rapid test**
- **Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan**
- **Menyediakan layanan sebagai tempat untuk pendidikan dan latihan bagi mahasiswa dalam praktek pengendalian faktor risiko lingkungan,vektor dan binatang penular penyakit**



PELAYANAN

Sumber Daya Manusia yang dimiliki adalah:

- Tenaga Sanitasi Lingkungan
- Entomolog Kesehatan
- Epidemiolog Kesehatan

Pelayanan meliputi:

- Melayani pemeriksaan sampel Air
- Melayani pemeriksaan makanan secara kimia dan bakteriologi
- Melayani pemeriksaan usap alat makan
- Melayani pemeriksaan air limbah secara digital/rapid test (DO, BOD, COD)
- Melayani pemeriksaan kesehatan lingkungan fisik (pencahayaan, kebisingan, suhu, kecepatan angin, kelembaban
- Melayani pemeriksaan tanah
- Melakukan pemeriksaan udara kimia



PELAYANAN

- Melayani survey dan identifikasi alat,
- Melayani survei dan identifikasi kecoa
- Melayani identifikasi tikus dan pinjal
- Melayani survey dan identifikasi nyamuk
- Melayani bedah tikus (Leptospirosis)
- Melayani pengendalian nyamuk
- Melayani pengendalian lalat
- Melayani pengendalian kecoa
- Melayani pengendalian Tikus



PELAYANAN

- Melayani survey dan identifikasi alat,
- Melayani survei dan identifikasi kecoa
- Melayani identifikasi tikus dan pinjal
- Melayani survey dan identifikasi nyamuk
- Melayani bedah tikus (Leptospirosis)
- Melayani pengendalian nyamuk
- Melayani pengendalian lalat
- Melayani pengendalian kecoa
- Melayani pengendalian Tikus



PELAYANAN

- Melayani pemeriksaan laboratorium lingkungan secara rapid test
- Melayani Surveilans Epidemiologi Kesehatan terhadap penyakit yang berbasis lingkungan
- Pendidikan dan pelatihan kesehatan lingkungan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat.





Oleh : Hamonagan Parhusip

SISTEM KEPATUHAN INTERNAL "PENTINGNYA DAN PENERAPANNYA DALAM ORGANISASI"

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka dibentuk Satuan Kepatuhan Internal (SKI) di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan berperan dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa Sistem Kepatuhan Internal (*Internal Compliance System*) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, standar, dan etika yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Sistem ini menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas organisasi, serta mencegah risiko pelanggaran yang dapat merugikan reputasi dan pelaksanaan tugas fungsi dari satuan kerja.

Pentingnya Sistem Kepatuhan Internal

A. Pelaksanaan Peraturan
Setiap satuan kerja wajib mematuhi peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Sistem kepatuhan membantu memastikan bahwa semua aktivitas proses bisnis satuan kerja sesuai dengan peraturan serta pedoman kerja.

B. Mencegah Risiko Pelanggaran
Tanpa sistem kepatuhan yang baik, satuan kerja rentan terhadap pelanggaran seperti dugaan tindak pidana korupsi, penipuan, atau pelanggaran etika. Sistem ini membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko tersebut sebelum berkembang menjadi masalah serius.

C. Meningkatkan Reputasi Satuan Kerja
Satuan kerja yang memiliki sistem kepatuhan yang kuat cenderung lebih dipercaya oleh stakeholders,pengguna jasa dan mitra kerja serta mampu memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokoknya dengan baik dan berintegritas.

D. Menciptakan Budaya Etis dan Bertanggung Jawab
Sistem kepatuhan mendorong terciptanya budaya satuan kerja yang beretika dan bertanggung jawab. ASN menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.

E. Efisiensi Operasional
Dengan adanya sistem kepatuhan, proses bisnis dapat berjalan lebih terstruktur dan terkontrol. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas fungsinya.

Komponen Utama Sistem Kepatuhan Internal

A. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan
Satuan kerja perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait sistem kepatuhan. Dokumen ini harus mudah diakses oleh seluruh karyawan dan secara berkala diperbarui sesuai dengan perubahan regulasi.

B. Pelatihan dan Sosialisasi
Seluruh ASN pada satuan kerja harus diberikan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya kepatuhan dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pelatihan dan Sosialisasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman.

C. Monitoring dan Audit Internal
Sistem kepatuhan harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan audit internal untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dijalankan dengan benar. Audit internal juga membantu mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem.

D. Pelaporan dan Whistleblowing
Sistem kepatuhan harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan audit internal untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dijalankan dengan benar. Audit internal juga membantu mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem.

E. Penegakan Disiplin dan Sanksi
Pelanggaran terhadap sistem kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas dan konsisten. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga integritas.

Tantangan dalam Menerapkan Sistem Kepatuhan Internal Internal

A. Perubahan Regulasi
Regulasi dan hukum seringkali berubah, sehingga organisasi harus selalu update dan menyesuaikan sistem kepatuhannya.

B. Keterbatasan Sumber Daya
Tidak semua satuan kerja memiliki SDM dengan kapasitas dan kompetensi untuk membangun,menjalankan dan memelihara Sistem Kepatuhan Internal yang efektif. Masih diperlukan komitmen kebijakkan management dalam memperkuat sistem kepatuhan, mengendalikan persepsi bahwa ASN yang tergabung dalam tim kepatuhan internal sebagai pengganggu bahkan sebagai pengadu lapor (whistleblower) di internal satuan kerja.
D. Resistensi
Beberapa ASN pada satuan kerja mungkin merasa bahwa sistem kepatuhan membatasi kebebasan mereka atau menambah beban kerja dan mengurangi fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi mereka tentang manfaat sistem ini.
E. Kompleksitas Operasional
Satuan kerja dengan operasional yang kompleks mungkin kesulitan dalam mengintegrasikan sistem kepatuhan pada proses bisnis tupoksinya.Tata hubungan kerja antar unit yang baik akan merupakan salah satu strategi mengendalikan tantangan ini.

Kesimpulan

Sistem Kepatuhan Internal bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pelayanan publik yang prima. Dengan menerapkan sistem ini, satuan kerja dapat meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan stakeholders, dan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, manfaat yang diperoleh dari Sistem Kepatuhan Internal jauh lebih besar daripada biaya atau upaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi masalah yang muncul dan efek domino ikutanyang terjadi akibat ketidaktaatan prosedur dan peraturan. Karena itu, setiap organisasi harus berkomitmen untuk membangun dan memelihara sistem kepatuhan yang kuat dan efektif.



Oleh : Friska Erlina Simamora

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA ORGANISASI BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 25 TAHUN 2019

Melihat adanya perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.Manajemen Risiko Terintegrasi adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi dan pengelolaan semua Risiko yang potensial dan diterapkan terhadap semua unit/bagian/program/kegiatan mulai dari penyusunan rencana strategis, penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran, pertanggungjawaban dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan :

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien

b. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi

c. memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan

d. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan :

a. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan

b. perlindungan kepada unit kerja dan aparatur sipil negara

c. mengurangi kejutan atas Risiko yang tidak diinginkan

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan

b.pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko

c. kesadaran setiap pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/ budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif

d. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja

e. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh

f. pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau Pegawai

g. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan anggaran dan evaluasi laporan kinerja yang diwujudkan melalui:
a. pembentukan struktur Manajemen Risiko
b. penerapan strategi Manajemen Risiko
c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

Strategi penerapan Manajemen Risiko meliputi :
a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan prosedur operasional standar
c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan ataupun untuk bahan perencanaan berikutnya

Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan:

A. Komunikasi dan konsultasi
Dilakukan kepada pihak yang berkepentingan baik internal dan eksternal.

B. Penetapan konteks
Dilakukan dengan menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal instansi/program/kegiatan, tujuan instansi/tujuan program/kegiatan, tugas dan fungsi unit kerja serta pihak yang berkepentingan.

C. Penilaian Risiko
Penilaian Risiko terdiri dari:
a. identifikasi Risiko;
b. analisis Risiko;
c. evaluasi Risiko.

D.Penanganan Risiko
Penanganan Risiko dimaksud menghasilkan:
a.Identifikasi berbagai opsi penanganan Risiko;
b.Penilaian atas opsi tersebut;
c. Rencana penanganan, persiapan, dan penerapannya.

E. Monitoring dan reviu
Monitoring dan reviu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan risiko.

Pelaksanaan monitoring dan reviu meliputi :

a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan.

b. Monitoring efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja.

c. Monitoring dan reviu dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran dan parameter yang ada.

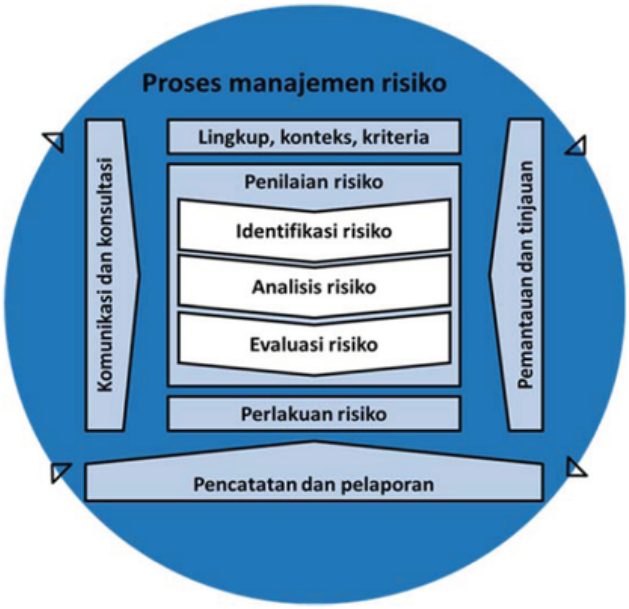
d. Audit dan/atau evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Monitoring dan reviu dimaksud menghasilkan keluaran dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

Pelaksanaan monitoring dan reviu meliputi :

a. Laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko

b. Laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan Risiko



Kesimpulan

Setiap pemilik Risiko membuat laporan penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kemenkes
BBKK Medan

Jl. Veteran No.219, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Kota Medan, Sumatera Utara 20411
(061) 6941343